

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693007/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 02
Tanggal : 10 Februari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
- 4. Kode>Nama Satker : (693007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
- Sebesar : Rp. 2.190.553.000 (DUA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.190.553.000
Rp. 2.190.553.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.190.553.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN K U P A N G (039) Rp. 2.190.553.000

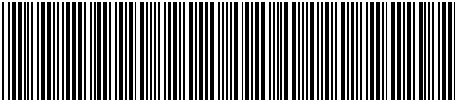
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693007/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7718-5743-9362-4705

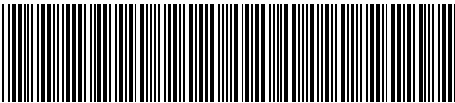
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						2.190.553.000	
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah						2.190.553.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			150,00	orang	54.420.000	
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual			150.00	orang	54.420.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			2,00	layanan	1.692.573.000	
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1.00	layanan	1.417.326.000	
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1.00	layanan	275.247.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik			2,00	dokumen, Peta, Data	443.560.000	
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah			2.00	Data	443.560.000	

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693007/2026
I B. SUMBER DANA



DS:7718-5743-9362-4705

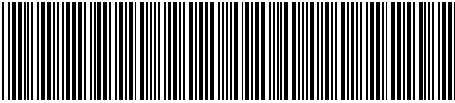
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.190.553.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693007/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7718-5743-9362-4705

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR
Kewenangan : (KD)

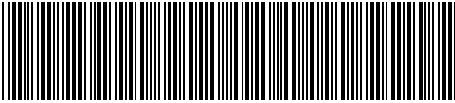
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR	-	2.190.553	-	-	-	2.190.553	24 . 51 039@ 24 . 51 039@ 24 . 51 039@	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.190.553	-	-	-	2.190.553		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.190.553	-	-	-	2.190.553		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	54.420	-	-	-	54.420		
04	PNBP	-	54.420	-	-	-	54.420		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	1.692.573	-	-	-	1.692.573		
04	PNBP	-	1.692.573	-	-	-	1.692.573		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (24.51 NUSA TENGGARA TIMUR / KOTA KUPANG)	-	443.560	-	-	-	443.560		
04	PNBP	-	443.560	-	-	-	443.560		
JUMLAH		-	2.190.553	-	-	-	2.190.553		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693007/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7718-5743-9362-4705

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (24) NUSA TENGGARA TIMUR
Kode>Nama Satker : (693007) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

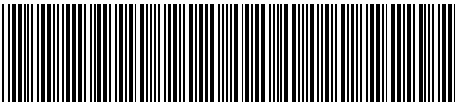
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	175.775	45.230	147.410	160.285	112.910	170.632	131.900	149.060	96.765	33.105	967.481	2.190.553
		BELANJA BARANG	0	175.775	45.230	147.410	160.285	112.910	170.632	131.900	149.060	96.765	33.105	967.481	2.190.553
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	175.775	45.230	147.410	160.285	112.910	170.632	131.900	149.060	96.765	33.105	967.481	2.190.553
	135.05.BF.7121	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	175.775	45.230	147.410	160.285	112.910	170.632	131.900	149.060	96.765	33.105	967.481	2.190.553

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693007/2026
IV A. B L O K I R



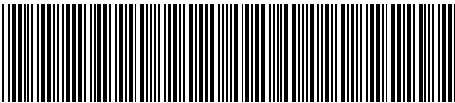
DS:7718-5743-9362-4705

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693007] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693007	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.790
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 779.374		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 779.374		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		522191 Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
	7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.800
	7121.AEF Sosialisasi dan Diseminasi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.944		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 278.069
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)	7121.BMA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.553
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.465		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.473
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	7121.BAH Pelayanan Publik Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		Data dan Informasi Publik
7121.BAH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.029		521211 Belanja Bahan(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.728
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 153.235
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693007/2026
IV A. B L O K I R



DS:7718-5743-9362-4705

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693007] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

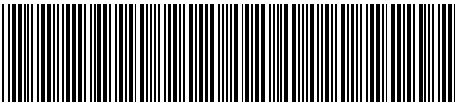
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 788 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693007/2026
IV B. C A T A T A N



DS:7718-5743-9362-4705

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [24] NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [693007] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001